

# Manajemen Strategis dalam Proses Pemilu: Meningkatkan Kepercayaan dan Partisipasi Pemilih di Papua Pegunungan – Studi Kasus Peran Komisioner KPU

Ansar S.<sup>\*1</sup>, Mahfudnumajuddin<sup>2</sup>, Ramlawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muslim Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received August 24, 2025

Accepted January 29, 2026

Available online 01 February 2026

### Kata Kunci:

Partisipasi Pemilih, Kepercayaan, Demokrasi Lokal, Pendekatan Budaya, Sistem Noken, Komunikasi Politik

### Keywords:

Voter Participation, Trust, Local Democracy, Cultural Approach, Noken System, Political Communication



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPP) Universitas Muhammadiyah Palopo.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran strategis Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebagai daerah pemekaran baru dengan tantangan geografis, sosial, dan budaya yang kompleks, Papua Pegunungan memerlukan pendekatan penyelenggaraan pemilu yang kontekstual dan sensitif terhadap kondisi lokal. Melalui metode kualitatif studi kasus, penelitian ini menggambarkan strategi yang digunakan oleh komisioner KPU, termasuk komunikasi personal dengan tokoh adat, sosialisasi berbasis budaya lokal, serta adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kultural dan partisipatif lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan pemilih. Keberhasilan ini menjadi bukti pentingnya pemahaman lokal dalam mengimplementasikan demokrasi secara substansial, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan demokrasi inklusif di wilayah-wilayah marjinal Indonesia.

## ABSTRACT

*This research examines the strategic role of the Commissioners of the General Election Commission (KPU) of Papua Mountains Province in increasing voter participation in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) areas. As a new expansion region with complex geographical, social and cultural challenges, Papua Pegunungan requires an approach to organizing elections that is contextual and sensitive to local conditions. Through a qualitative case study method, this research describes the strategies used by KPU commissioners, including personal communication with traditional leaders, local culture-based socialization, and adaptation to infrastructure limitations. The results show that cultural and participatory approaches are more effective in building community trust and increasing voter engagement. This success is a testament to the importance of local understanding in implementing democracy in a substantial way, and makes a significant contribution to the development of inclusive democracy in Indonesia's marginalized regions.*

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi yang kuat dan representatif hanya dapat dicapai ketika pemilih berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilu (Daraghmi, Hamoudi, & Abu Helou, 2024). Partisipasi pemilih menunjukkan tingkat kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi, di samping keberhasilan teknis penyelenggaraan pemilu. Tingkat kepercayaan publik terhadap kejujuran penyelenggara pemilu, keterbukaan proses, dan dedikasi pemerintah dalam menjamin hak-hak politik rakyat, semuanya berkorelasi kuat dengan tingkat partisipasi pemilih (Garnett, 2019; Lissitsa, 2021). Partisipasi pemilih dapat menurun jika tidak ada kepercayaan karena masyarakat mungkin meragukan hasil pemilu atau berpikir bahwa proses demokrasi tidak akan memperbaiki kehidupan mereka.

Komisioner KPU Provinsi Pegunungan Papua memikul beban berat untuk menjembatani kesenjangan antara dinamika sosial budaya lokal dan sistem demokrasi negara. Mereka harus

membangun kepercayaan dengan kelompok adat, menciptakan teknik komunikasi politik yang kontekstual, dan menjamin bahwa semua warga negara, di mana pun mereka tinggal, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilih mereka. Pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis, juga bergantung pada peran optimal pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat (Hutabalian, 2023). Strategi komprehensif yang mencakup pendidikan politik, penjangkauan daring, dan dialog produktif dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu, terutama di wilayah seperti Papua yang memiliki karakteristik demografi dan geografis yang berbeda (Endriasari & Santoso, 2022; Mulyana & Tambunan, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang Peran Komisioner KPU dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Partisipasi Pemilih (Kaplow & Kominers, 2024; Spina et al., 2025; Sulastri, Purnomo, Setiawan, Fathani, & Oktawan, 2020). Namun, belum banyak studi yang secara spesifik menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat kota atau kabupaten, khususnya partisipasi politik di wilayah marjinal. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya menggali lebih dalam bagaimana peran komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam membangun partisipasi pemilih secara substantif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian ini mencoba menelusuri berbagai strategi, pendekatan, serta tantangan yang dihadapi dalam mendorong keterlibatan masyarakat pegunungan dalam proses pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pemilu di daerah pegunungan serta kontribusi akademik bagi pengembangan studi partisipasi politik di wilayah marjinal.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran strategis Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta keterlibatan pemilih di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan budaya yang kompleks. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis peran Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan pemilih melalui pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 *Partisipasi Politik*

Salah satu komponen penting demokrasi adalah keterlibatan politik. Keterlibatan politik mencakup segala aktivitas yang dilakukan warga negara untuk memengaruhi keputusan politik yang berdampak pada mereka (Cazorla Martín, Ortega, & Montabes, 2023; Hernandez, Cordoba, & Chumaceiro, 2021). Menurut model sosiologis mereka, partisipasi politik melampaui proses elektoral dan mencakup keterlibatan publik dalam wacana politik, protes, dan bahkan aktivitas politik informal seperti adat istiadat yang umum di banyak daerah, termasuk Dataran Tinggi Papua (Ekman & Amnå, 2012; Cazorla Martín et al., 2023). Definisi yang luas ini menyoroti karakter sukarela dan non-profesionalnya sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, atau negara dengan mencakup berbagai bentuk keterlibatan, seperti pemungutan suara, petisi, boikot, dan aktivisme daring.

### 2.2 *Kepercayaan*

Kepercayaan politik merupakan elemen penting dalam keberlangsungan sistem demokrasi, memengaruhi legitimasi pemerintahan dan partisipasi warga negara. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap institusi politik secara langsung berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Sehingga, partisipasi politik masyarakat menjadi indikator kunci keberhasilan

demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya dalam proses politik (Merliana & Suhardiyanto, 2021). Keikutsertaan warga negara dalam setiap proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan manifestasi dari partisipasi politik yang esensial untuk mempengaruhi kebijakan publik (Ilmy, Rahmatunnisa, & Hendra, 2021). Komisioner KPU merupakan komponen vital dalam menjaga integritas dan transparansi pemilihan umum, yang secara langsung memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, peran komisioner KPU dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu sangat krusial, mengingat integritas pemilu adalah fondasi bagi legitimasi pemerintahan yang terpilih (Armadawati, 2022).

Penelitian ini berangkat dari paradigma Demokrasi Partisipatoris, yang menempatkan partisipasi warga negara sebagai inti dari legitimasi demokrasi (Pateman, 1970; Barber, 1984). Dalam perspektif ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pemilihan, tetapi sebagai proses sosial yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Tingginya partisipasi pemilih mencerminkan keberhasilan institusi demokrasi dalam membangun rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Namun, partisipasi politik tidak dapat dilepaskan dari tingkat kepercayaan institusional (*institutional trust*). Menurut Easton (1965) dan Levi & Stoker (2000), kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu menjadi prasyarat utama bagi keterlibatan politik warga. Ketika masyarakat memandang institusi sebagai adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, mereka cenderung lebih bersedia berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks Papua Pegunungan, kepercayaan ini tidak hanya dibangun melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui pendekatan interpersonal dan budaya.

Selanjutnya, penelitian ini juga didasarkan pada Teori Modal Sosial (Putnam, 1993; Coleman, 1988), yang menekankan pentingnya jaringan sosial, norma bersama, dan kepercayaan sebagai modal kolektif dalam mendorong aksi bersama. Peran tokoh adat, komunikasi personal, serta praktik budaya seperti sistem noken merupakan bentuk modal sosial yang memperkuat kohesi komunitas dan memfasilitasi partisipasi politik. Komisioner KPU berfungsi sebagai *bridging social capital*, yakni penghubung antara negara dan masyarakat adat, sehingga memungkinkan integrasi nilai demokrasi formal dengan struktur sosial lokal.

Dalam kerangka yang lebih luas, penelitian ini berpijak pada konsep Demokrasi Kontekstual atau Demokrasi Lokal, yang menyatakan bahwa implementasi demokrasi harus disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis masyarakat setempat (Diamond, 1999; Fung & Wright, 2001). Demokrasi yang substantif tidak dapat dipaksakan secara seragam, melainkan perlu diadaptasi melalui pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal. Oleh karena itu, strategi KPU Papua Pegunungan yang menekankan sosialisasi berbasis budaya dan komunikasi partisipatif mencerminkan praktik *context-sensitive governance*.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Assyakurrohim, Ikhrum, Sirodj, & Afgani, 2022; Baskarada, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks sosial dan kultural yang khas di wilayah Papua Pegunungan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan holistik, serta menangkap realitas yang kompleks dari perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung (Oranga & Matere, 2023). Lokasi penelitian difokuskan di Provinsi Papua Pegunungan, dengan

penekanan pada beberapa kabupaten yang memiliki dinamika politik dan sosial yang signifikan, yakni Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Nduga. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan representasi wilayah dengan latar belakang budaya yang kuat serta adanya tantangan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Subjek penelitian terdiri dari para komisioner KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, tokoh adat yang memiliki pengaruh sosial dan politik dalam komunitas lokal, serta masyarakat pemilih sebagai pihak yang mengalami secara langsung dampak dari peran KPU dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

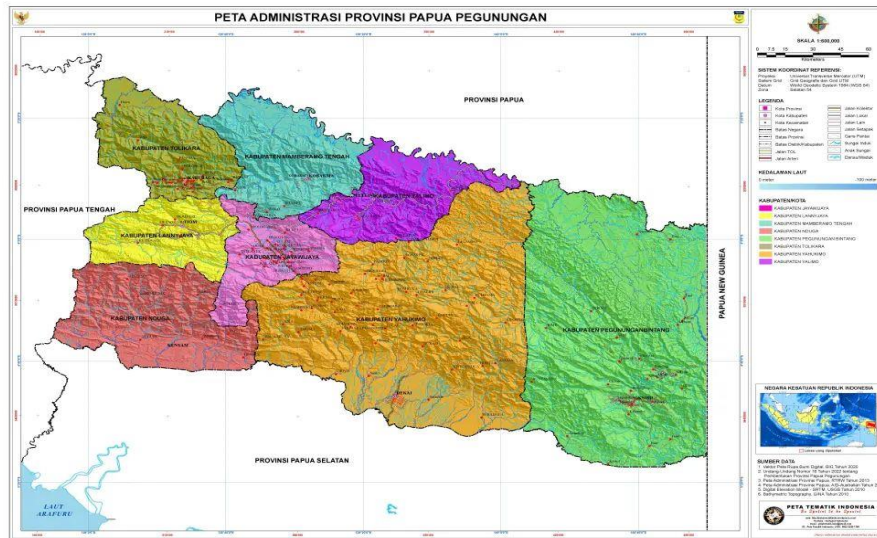
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk menggali informasi mengenai pandangan, pengalaman, serta praktik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisioner. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap interaksi sosial yang terjadi dalam berbagai kegiatan KPU maupun dalam dinamika masyarakat setempat. Studi dokumentasi juga dimanfaatkan untuk menelaah dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan, serta arsip lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif yang melibatkan tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses reduksi data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi, merangkum, dan menyusun data mentah ke dalam kategori yang bermakna. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap hubungan antar kategori. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dan terus diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik dari segi sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas temuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi empiris secara lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **4. HASIL**

### *4.1 Profil Wilayah Penelitian*

Provinsi Papua Pegunungan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua yang mencakup kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan tengah. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang sulit dijangkau, dengan medan berbukit dan akses transportasi yang terbatas. Keberagaman etnis dan suku menjadi ciri khas utama, di mana setiap kelompok memiliki bahasa, adat, dan sistem sosial yang berbeda. Ikatan kekerabatan dan nilai-nilai budaya lokal seperti sistem noken dalam pemilu masih dijunjung tinggi, mencerminkan kedekatan sosial yang erat antar anggota komunitas. Meskipun demikian, tantangan besar dalam pembangunan di daerah ini adalah aksesibilitas dan infrastruktur yang masih terbatas, yang seringkali mempengaruhi efektivitas layanan publik. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, terutama dalam hal konektivitas dan distribusi sumber daya. Proses pemekaran wilayah diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Namun, keberagaman budaya yang ada juga memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sensitif agar tidak menimbulkan konflik antar kelompok.



**Gambar 1:** Peta Provinsi Papua Pegunungan (Tahun 2023)

#### 4.2 Peran Komisioner KPU dalam Membangun Partisipasi Pemilih

Komisioner KPU di Provinsi Papua Pegunungan menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Mereka mengimplementasikan berbagai strategi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Salah satunya adalah pendekatan personal dengan tokoh adat dan agama yang memiliki pengaruh kuat dalam komunitas. Melalui pertemuan informal seperti "*coffee morning*", KPU membangun komunikasi yang lebih dekat dan saling percaya dengan masyarakat. Selain itu, KPU menerjemahkan materi sosialisasi ke dalam bahasa daerah setempat untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas. Keterlibatan pemuda dan perempuan juga menjadi fokus utama dalam proses edukasi politik berbasis komunitas (Mendes Borges, 2020; Mengnjo & Manka'a, 2023). Metode distribusi informasi disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk penggunaan alat komunikasi tradisional seperti pengeras suara dan spanduk yang dipasang di tempat strategis.

#### 4.3 Tantangan Yang Dihadapi Komisioner KPU

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, komisioner KPU menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi menjadi hambatan utama dalam mobilisasi petugas dan distribusi logistik pemilu. Selain itu, rendahnya literasi politik masyarakat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap proses demokrasi. Minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi kultural juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program edukasi politik. Tantangan keamanan di beberapa wilayah konflik, seperti Kabupaten Nduga, menambah kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, para komisioner berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi hambatan tersebut. Kolaborasi ini mencakup kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan guna memperluas jangkauan edukasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (Hariyanto & Rafni, 2019). Peran serta aktif berbagai elemen masyarakat, termasuk fasilitator seperti Relawan Demokrasi, sangat krusial dalam memperluas jangkauan pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula yang kerap memiliki perilaku politik khas dan melek teknologi (Suryanef & Rafni, 2020).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, dalam praktiknya,

penerapan sistem pemilu di daerah-daerah tertentu, seperti Papua Pegunungan, menghadapi tantangan khusus terkait budaya lokal. Salah satu tantangan tersebut adalah penggunaan sistem noken yang masih dipraktikkan di banyak wilayah adat di Papua. Sistem noken adalah sebuah mekanisme tradisional di mana pemilih, melalui perantara tokoh adat atau pemimpin masyarakat, memberikan suara mereka secara kolektif. Sistem ini bertentangan dengan prinsip pemilu modern yang menekankan pada partisipasi individu dan kerahasiaan suara.

Walaupun sistem noken tidak secara eksplisit diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu, KPU tetap memberikan ruang untuk mempertimbangkan dan memahami budaya lokal yang berlaku. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pemilu dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, KPU tetap dihadapkan pada dilema dalam menyeimbangkan antara prinsip demokrasi formal dan praktik tradisional yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua. Hal ini menuntut KPU untuk lebih adaptif dalam mengembangkan aturan pemilu yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas. Namun, sistem noken yang diterima oleh masyarakat adat sering kali mengundang kritik, terutama terkait dengan transparansi dan potensi manipulasi suara. KPU harus menghadapi kesulitan besar dalam menyusun mekanisme yang mengakomodasi sistem tradisional ini sambil memastikan integritas pemilu tetap terjaga. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu di Papua perlu lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerahasiaan suara dan pemilu yang bebas dari campur tangan pihak tertentu. Hal ini esensial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan, sekaligus mengadaptasi sistem penghitungan suara nasional secara online yang menjamin akuntabilitas dan keterbukaan hasil (Tampubolon, Amin, & Harahap, 2021).

#### 4.4 *Pembahasan*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan membangun kepercayaan dan partisipasi pemilih bergantung pada kemampuan komisioner KPU dalam memahami dan beradaptasi dengan konteks lokal. Pendekatan personal dan kultural terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan formal di daerah pegunungan. Meskipun kontroversial, sistem noken masih digunakan di banyak TPS di Papua Pegunungan, mencerminkan pentingnya tradisi lokal dalam demokrasi. Namun, penggunaan noken berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, sehingga KPU perlu memetakan wilayah rawan konflik dan melakukan mitigasi. Kendala geografis, infrastruktur yang terbatas, dan sinyal komunikasi yang lemah memperlambat rekapitulasi suara dan distribusi logistik, termasuk surat suara dan kotak suara. Transportasi yang bergantung pada jalur udara atau perahu, serta medan yang sulit dijangkau, meningkatkan biaya logistik dan mempengaruhi partisipasi pemilih. Kualitas jaringan komunikasi yang buruk membuat pemantauan dan sosialisasi pemilu menjadi sulit. Menurut Bryson (2018), manajemen strategis dalam organisasi publik harus memperhatikan aspek konteks lokal, terutama ketika beroperasi pada lingkungan sosial dan budaya yang beragam. Hal ini berarti strategi yang efektif di satu wilayah belum tentu relevan di wilayah lain jika tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik lokal masyarakat

Untuk mengatasi masalah ini, KPU perlu menyesuaikan jadwal pemilu di daerah terpencil dan memperkenalkan mekanisme distribusi yang lebih fleksibel. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal sangat penting untuk kelancaran proses pemilu. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi akan membantu mengatasi hambatan komunikasi. Pendekatan kontekstual dan berbasis komunitas adalah kunci untuk memastikan pemilu yang adil dan inklusif di wilayah Papua Pegunungan. Selain itu, pelatihan bagi petugas pemilu setempat dengan metode

yang sesuai dengan kondisi lokal akan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan. KPU juga perlu memanfaatkan teknologi sederhana, seperti video offline, untuk memastikan informasi dapat diterima oleh masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses terbatas. Teori kapabilitas organisasi menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan inti dari adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan kerja (Ulrich & Lake, 1991). Pelatihan yang disesuaikan dengan konteks lokal membantu petugas pemilu memahami tantangan spesifik, termasuk kendala geografis dan budaya, sehingga mereka dapat bertindak efektif dalam situasi yang kompleks. Prinsip ini sejalan dengan konsep *situated learning*, yang menyatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih efektif apabila berakar di dalam konteks nyata tempat kegiatan berlangsung (Lave & Wenger, 1991). Pelatihan yang sesuai dengan kondisi lokal memungkinkan petugas pemilu untuk menyerap kompetensi yang benar-benar diperlukan di lapangan.



**Gambar 2.** Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Sumber: Studi lapangan dan analisis kualitatif di Provinsi Papua Pegunungan

Berdasarkan informasi pada Gambar 2, strategi utama Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pemilih di wilayah terpencil adalah dengan melibatkan tokoh adat dan agama, serta kegiatan informal seperti coffee morning yang membuka ruang dialog dengan masyarakat. Selain itu, penerjemahan materi sosialisasi ke dalam bahasa daerah dan edukasi politik berbasis komunitas menjadi bagian penting dari strategi ini. Dalam kondisi geografis yang terbatas, penggunaan alat komunikasi tradisional seperti pengeras suara dan spanduk tetap efektif (Darajat & Muhtadi, 2020; Wijaya, Sukardani, & Oktariyanda, 2021). Strategi ini secara signifikan berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih, yang sebelumnya menjadi tantangan kronis dalam pemilihan umum pasca-reformasi (Hariyanto & Rafni, 2019).

Komisioner KPU memiliki peran kunci dalam membangun kepercayaan dan partisipasi pemilih, mengingat tantangan geografis, keanekaragaman budaya, dan rendahnya literasi politik di beberapa wilayah. Mereka tidak hanya menyelenggarakan pemilu secara teknis, tetapi juga menyampaikan informasi yang sesuai dengan konteks lokal dan membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang adil. Penggunaan sistem noken di beberapa daerah menuntut komisioner untuk memahami kearifan lokal sambil menjaga prinsip-prinsip pemilu. Keberhasilan pemilu di Papua Pegunungan sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan kedekatan komisioner dengan masyarakat, serta strategi yang sensitif terhadap budaya dan kondisi geografis setempat.

#### 4.4.1 *Studi Perbandingan Strategi Kpu: Papua Pegunungan Dan Wilayah 3t Lainnya*

Data menunjukkan adanya lonjakan besar dalam partisipasi pemilih di seluruh kabupaten Papua Pegunungan pada 2024. Ini diduga kuat merupakan hasil dari berbagai strategi sosialisasi dan peningkatan infrastruktur pemilu yang dilakukan oleh KPU, termasuk pendekatan kultural yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

**Tabel 1.** Perbandingan Partisipasi Pemilih; Pemilu 2019 vs Pilkada 2024

Kabupaten	Pemilu 2019 (%)	Pilkada 2024 (%)
Jayawijaya	72.5	99.88
Tolikara	70.3	99.88
Yalimo	68.9	99.88
Lanny Jaya	71.2	99.88
Mamberamo Tengah	69.8	99.88
Pegunungan Bintang	70.5	99.88
Nduga	69.0	99.88
Yahukimo	70.7	99.88

Sumber: Kompas TV-DPT Papua Pegunungan 2024.

Papua Pegunungan, sebagai provinsi baru hasil pemekaran Papua, menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu, seperti akses geografis yang sulit, infrastruktur terbatas, dan kondisi sosial budaya yang kental. Sebagai daerah 3T, KPU Papua Pegunungan mengembangkan strategi berbasis kultural dan partisipatif, yang melibatkan tokoh adat, pemimpin gereja, dan masyarakat lokal untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan nilai lokal. Sosialisasi dilakukan dalam bahasa daerah dan melalui acara budaya seperti bakar batu. Di beberapa wilayah, sistem noken masih digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap praktik demokrasi komunitarian. Sebaliknya, di wilayah 3T lainnya seperti NTT dan Kalimantan Utara, KPU fokus pada optimalisasi infrastruktur dan digitalisasi. Di daerah ini, teknologi informasi dan pelatihan online digunakan untuk meningkatkan kualitas pemilu, meskipun akses internet tidak merata. Di wilayah kepulauan seperti Talaud, tantangan utamanya adalah logistik dan keterjangkauan geografis, yang diatasi dengan distribusi logistik fleksibel menggunakan armada laut dan media radio komunitas.

Dari studi perbandingan ini, Papua Pegunungan dapat mengadopsi beberapa praktik terbaik, seperti pelatihan berbasis video offline yang diterapkan di NTT dan pengembangan radio komunitas untuk menjangkau daerah terpencil. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga sosial seperti gereja dan sekolah dalam distribusi logistik dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat keterlibatan komunitas. Dengan menggabungkan pendekatan berbasis budaya dan praktik adaptif dari wilayah lain, KPU Papua Pegunungan dapat menciptakan model pemilu yang inklusif dan partisipatif. Keberhasilan ini bergantung pada inovasi, pemahaman kebutuhan lokal, dan kemitraan dengan semua elemen masyarakat di tingkat akar rumput.

#### 4.4.2 *Studi Kasus Lapangan*

Pemilu 2024 di Papua Pegunungan menandai pencapaian penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah 3T, berkat strategi KPU yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Salah satu contoh sukses adalah pengalaman tokoh adat Mama Martha di Distrik Dekai, Yahukimo. Dengan menggunakan pendekatan berbasis budaya, seperti acara bakar batu, KPU berhasil mengajak masyarakat berbicara langsung tentang pemilu dengan cara yang akrab dan personal. Pendekatan ini membuat perempuan merasa dihargai dan memahami pentingnya hak

suara mereka. Sebelum pendekatan ini, partisipasi perempuan hanya 40%, namun pada Pemilu 2024 meningkat lebih dari 80%.

Selain itu, pengalaman Yakobus Tabuni, Ketua KPPS di Lanny Jaya, menunjukkan bagaimana semangat masyarakat dapat mengatasi kendala logistik. Meskipun medan sulit, Yakobus dan timnya berjalan kaki dua hari untuk mengantar logistik ke kampung terpencil. Sebagai hasilnya, tingkat partisipasi pemilih di distrik tersebut melonjak dari 65% menjadi hampir 99%. Kedua kisah ini menegaskan pentingnya pendekatan yang menghargai kearifan lokal dan semangat gotong royong dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Strategi berbasis kepercayaan dan keterlibatan komunitas lokal terbukti efektif mengatasi tantangan logistik, sosial, dan budaya.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan sangat menentukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah 3T melalui pendekatan kontekstual yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat. Strategi berbasis budaya, komunikasi personal, serta adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur terbukti mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menghadirkan demokrasi yang lebih inklusif. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di daerah dengan karakteristik unik tidak dapat mengandalkan pendekatan administratif semata, tetapi memerlukan pemahaman lokal, penghormatan terhadap tradisi, serta keterlibatan aktif komunitas. Lonjakan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Papua Pegunungan menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal dapat menjadi model efektif bagi wilayah 3T lainnya.

Lebih lanjut, temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial antara penyelenggara dan masyarakat. Oleh karena itu, KPU RI disarankan mengembangkan model sosialisasi berbasis komunitas yang dipadukan dengan teknologi sederhana, memperkuat kaderisasi penyelenggara lokal, serta menyusun program pendidikan politik jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik daerah. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat budaya demokrasi, meningkatkan literasi politik masyarakat, dan memastikan partisipasi pemilih yang berkelanjutan, sehingga proses pemilu di wilayah 3T dapat berlangsung lebih adil, inklusif, dan berkualitas.

## REFERENSI

- Armadawati, C. F. (2022). Pengaruh Trust in Institutions terhadap Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula. *Buletin Penelitian Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 2(1), 172–179.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Baskarada, S. (2014). Qualitative case study guidelines. *Başkarada, S.(2014). Qualitative Case Studies Guidelines. The Qualitative Report*, 19(40), 1–25.
- Cazorla Martín, Á., Ortega, C., & Montabes, J. (2023). Direct and Indirect Effects of Emotions towards Party Leaders on Voting: Evidence from the 2018 Andalusian Regional Election. *Social Sciences*, 12(10), 568.
- Daraghmi, E., Hamoudi, A., & Abu Helou, M. (2024). Decentralizing Democracy: Secure and Transparent E-Voting Systems with Blockchain Technology in the Context of Palestine. *Future Internet*, 16(11), 388.

- Darajat, D. M., & Muhtadi, M. (2020). Strategi Literasi Politik untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Sosio Informa*, 6(3), 305–317.
- Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. *Human Affairs*, 22(3), 283–300.
- Endriasari, P. P., & Santoso, R. B. (2022). Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 6(2), 531–543.
- Garnett, H. A. (2019). On the front lines of democracy: perceptions of electoral officials and democratic elections. *Democratization*, 26(8), 1399–1418.
- Hariyanto, K., & Rafni, A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi oleh KPU Kota Padang pada Pilkada 2018. *Journal of Civic Education*, 2(2), 190–196.
- Hernandez, J. J., Cordoba, E., & Chumaceiro, A. C. (2021). Political culture and citizen participation: Transiting from political space. *Fronteira: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(1), 140–157.
- Hutabalian, R. (2023). Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 80–93.
- Ilmy, M. I., Rahmatunnisa, M., & Hendra, H. (2021). Upaya KPU kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada di masa pandemi covid-19. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2).
- Kaplow, L., & Kominers, S. D. (2024). On the Representativeness of Voter Turnout. *The Journal of Law and Economics*, 67(4), 879–904.
- Lissitsa, S. (2021). Effects of digital use on trust in political institutions among ethnic minority and hegemonic group—A case study. *Technology in Society*, 66, 101633.
- Mendes Borges, A. C. (2020). Youth agency in civic education: Contemporary perspectives from Cabo Verde. *Societies*, 10(3), 53.
- Mengnjo, T. T., & Manka'a, A. M. (2023). Education as an Instrument for Ensuring the Participation of Women in Politics for the Attainment of the Sustainable Development Goal (SDG) on Gender Equality: Empirical Lessons from Bafut in the North West Region of Cameroon. *American Journal of Public Policy and Administration*, 8(3), 34–48. <https://doi.org/10.47672/ajppa.1698>
- Merliana, F., & Suhardiyanto, A. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sokoyoso Tahun 2019 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. *Unnes Political Science Journal*, 5(2), 64–68.
- Mulyana, M., & Tambunan, C. J. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, pp. 240–262. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2259>
- Oranga, J., & Matere, A. (2023). Qualitative research: Essence, types and advantages. *Open Access Library Journal*, 10(12), 1–9.
- Spina, D., Pappalardo, G., Raimondo, M., Califano, G., Di Vita, G., Caracciolo, F., & D'Amico, M. (2025). Cultivating trust: public perception of RNAi technologies in agriculture. *International Journal of Food Science and Technology*, 60(1), vvaf066.

- Sulastri, E., Purnomo, E. P., Setiawan, A., Fathani, A. T., & Oktiawan, C. (2020). Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 308–332.
- Suryanef, S., & Rafni, A. (2020). First-time voter education through the democracy volunteer movement. *Journal of Moral and Civic Education*, 4(2), 60–68.
- Tampubolon, F. D. G., Amin, M., & Harahap, H. (2021). Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 10(2), 399–415.
- Wijaya, R., Sukardani, P. S., & Oktariyanda, T. A. (2021). Social media as a communication strategy in voter education by KPU Surabaya City during the Covid-19 pandemic. *International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 709–714. Atlantis Press.
- Komisi Pemilihan Umum. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia